

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan global yang hampir menimpa seluruh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkotika di Indonesia antara lain adalah letak geografis yang strategis, jumlah masyarakat yang banyak, sistem keamanan pada wilayah perbatasan yang lemah, dan tingginya permintaan pasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN JPA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil menyimpulkan bahwa Perkara nomor 74/Pid.Sus/2019/PN JPA, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dianggap masih rendah jika dibandingkan dengan tindak kejahatan yang dilakukan, terutama karena kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukuman yang dijatuhkan belum memberikan efek jera yang diharapkan. Hakim juga menimbang keadaan yang memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan dapat merusak mental serta kesehatan orang lain. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

**Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Penyalahgunaan Narkotika**

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a global problem that affects almost the entire international community, including Indonesia. Factors that support narcotics abuse in Indonesia include strategic geographical location, large population, weak security system in border areas, and high market demand. The purpose of this research is to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes and the judge's considerations in determining criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in case Number 74/Pid.Sus/2019/PN JPA. This research uses a normative juridical approach. The specifications used in this research are descriptive research specifications. Data analysis in this research used qualitative descriptive methods. The results concluded that in Case number 74/Pid.Sus/2019/PN JPA, the judge sentenced the defendant to imprisonment for 5 years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00, with the provision that if the fine was not paid, it would be replaced by a criminal penalty. imprisonment for 2 months is in accordance with Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, it is considered still low when compared to the crimes committed, especially because cases of narcotics abuse are increasing from year to year. This gives the impression that the punishment imposed has not had the desired deterrent effect. The judge also considered aggravating circumstances, such as the defendant's actions not supporting the government's program to eradicate drugs and which could damage the mental and health of other people. On the other hand, the judge also considered mitigating circumstances, namely that the defendant frankly admitted his actions, regretted them, and promised not to repeat them again.*

**Keywords:** *Application of Criminal Sanctions, Narcotics Abuse*